

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

China atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Republik Rakyat China atau RRC merdeka pada 1 Oktober 1949. China menganut ideologi komunisme tetapi selain komunisme, ada beberapa ideologi yang terdapat di China yaitu sosialisme, konfusianisme dan nasionalisme. China beribukota di Beijing yang terletak di daratan China. Jika membahas tentang sejarahnya, peradaban China dimulai pada 221 sebelum masehi dengan negara yang berbentuk dinasti. Dinasti yang pertama adalah Dinasti Xia dilanjutkan dengan Dinasti Shang, Dinasti Zhou, dan sederetan dinasti lain hingga dinasti terakhir dan dinasti yang berkuasa paling lama yaitu Dinasti Qing. Tahun 1911, kekuasaan Dinasti Qing digulingkan oleh Revolusi Xinhai. Revolusi Xianhai yang sukses kemudian mendapat sambutan dari banyak kalangan di Cina, seperti para pegawai muda, tentara, dan pelajar. Sun Yat Sen pun diangkat sebagai presiden pertama Republik Cina pada 12 Maret 1912. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamkan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) di Tiananmen.

Setelah didirikannya RRC, Mao Zedong menjabat sebagai Perdana Menteri. China termasuk negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yang mana didalam negara tersebut terdapat 2 pemimpin yaitu Presiden dan Perdana Menteri namun yang boleh berkuasa hanyalah Perdana Menteri. Presiden dianggap sebagai symbol dan hanya boleh menjalankan tugas kenegaraan seperti menerima duta besar, menerima surat-surat resmi, dll. Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Mao Zedong, negara yang sering dijuluki negara Tirai Bambu ini berusaha untuk terus meningkatkan perekonomian negaranya karena pada masa itu, China dinilai belum berada diekonomi yang bagus.

Sistem komunisme yang dianut China diperkuat dengan adanya partai komunis terbesar di China yaitu Partai Komunis China atau PKC. Pemerintah China sendiri hanya menerapkan sistem satu partai dominasi dan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selaras dengan PKC. Komunis sudah mulai menguasai China sejak 1949 yang beriringan dengan perkembangan PKC. PKC juga memegang kendali penuh atas pemerintah. Dengan jumlah anggota sebanyak 89 juta orang menjadikan PKC sebagai partai terbesar didunia (Darlington, 2017).

Setelah Mao Zedong meninggal pada 1976, kepemimpinan China beralih pada Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dianggap sebagai bapak modernisasi China yang mencetuskan 4 modernisasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Militer, Pertanian dan Industri. Dengan berbagai kemajuan dan modernisasi China dapat dikatakan sebagai negara terkuat di Asia dan terus melebarkan sayapnya diberbagai bidang. Meskipun dalam sistem politik China menganut sistem komunis tetapi dalam hal ekonomi China menganut sistem kapitalisme barat. Seperti yang kita ketahui, produk-produk buatan China sudah merajai pasar diberbagai belahan dunia mulai dari elektronik, property, barang dan jasa, dll. Sehingga China dikenal sebagai negara terkuat di Asia.

Selain dikenal sebagai negara terkuat di Asia yang menguasai ekonomi, China juga dikenal sebagai negara yang populasi penduduknya padat. Jumlah penduduk China sebanyak 1,4 miliar yang tersebar diberbagai negara. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dengan menerapkan *one child policy*. *One child policy* atau kebijakan satu anak adalah kebijakan untuk setiap pasangan hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Keunikan dari China tidak hanya sampai disitu saja, China menerapkan *one country two system* atau satu negara dengan dua sistem. *One country two system* adalah cara

pemerintah China untuk menyelesaikan masalah dengan Hongkong pada tahun 1997 (Yee, 2014).

Disebut sebagai satu negara dua sistem dikarenakan satu negara yang dimaksud adalah RRC sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan dua sistem yang dimaksud adalah sistem sosialisme yang berada di China dan sistem demokrasi dan kapitalisme berada di Hongkong, Macau, dan Taiwan. Dengan adanya *one country two system*, China juga menerapkan adanya *Special Administrative Region* atau yang lebih sering dikenal dengan SAR China. SAR China adalah administrasi khusus untuk ketiga wilayah di China yaitu Hongkong, Macau dan Taiwan. Ketiga negara tersebut diberi kebebasan dalam urusan dalam negerinya termasuk untuk menentukan mata uang mereka sendiri. Tetapi untuk kekuatan militer dan beberapa hal lainnya, ketiga wilayah China tersebut harus tetap mematuhi sistem pemerintah pusat.

Seperti yang sudah disebutkan diawal, bahwa China menganut ideology komunisme. China dapat dikatakan sebagai negara penganut sistem komunisme yang masih bertahan hingga saat ini mengingat bahwa negara yang menganut sistem komunis sebelumnya tidak mampu bertahan dalam menghadapi persaingan dunia seperti Uni Soviet yang pada akhirnya harus runtuh. Sistem komunisme di China menjadikan negara tersebut menerapkan satu partai dominasi yang mampu mengendalikan jalannya pemerintahan.

Meskipun saat ini komunisme dan partai komunis mendominasi tetapi sebelum berkembangnya ideology tersebut terdapat ideology sebelumnya yang menjadi awal mula kemerdekaan Republik Rakyat China yaitu Nasionalisme yang ada sejak tahun 1912. Dari gerakan dan ideology nasionalis tersebut maka terbentuklah partai nasionalis yang disebut Koumintang yang ide dan gagasan dari partai tersebut tersebar keseluruh China pada tahun 1928-1949. Partai nasionalis atau Koumintang awalnya dipimpin oleh Sun Yat Send an mampu

membawa partai tersebut sebagai partai pertama yang berpartisipasi di parlemen Tiongkok pada saat itu.

Tidak lama sejak Koumintang berpartisipasi di parlemen, partai tersebut kemudian bubar dengan adanya kudeta. Meskipun telah dibubarkan tidak meruntuhkan usaha Sun Yat Sen untuk membangun partai nasionalis yang lebih kuat. Sepeninggalan Sun Yat Sen pada tahun 1925 kepemimpinan partai tersebut beralih ketangan Chiang Kai Shek yang kemudian membawa Tiongkok berada sepenuhnya dibawah kepemimpinan Chiang Kai Shek. Partai dan gerakan nasionalis tidak dapat dipisahkan dari Chiang Kai Shek. Meskipun Sun Yat Sen sudah tiada namun partai nasionalis masih tetap bertumpu pada prinsip dasar Sun Yat Sen yaitu demokrasi, nasionalisme dan kesejahteraan.

Dari ketiga prinsip Sun Yat Sen tersebut satu persatu mulai diwujudkan namun tidak satupun dari ketiganya berhasil mulai dari mewujudkan demokrasi dalam konstitusi hingga memperbaiki kesejahteraan masyarakat pun gagal. Kegagalan-kegagalan diakibatkan oleh kelemahan pemimpin dan keengganan partai nasionalis untuk mereformasi struktur yang sudah kuno. Kekuatan partai nasionalis mulai melemah setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945 yang justru melahirkan kekuatan baru yaitu komunis yang lebih besar hingga pada akhirnya komunis menguasai didaratan China pada tahun 1949. Terlebih lagi ketika para pejabat pemerintahan yang menentang Chiang Kai Shek bergabung dengan komunisme yang saat ini mendominasi di China ((Britanica.com)).

Dengan hanya menerapkan satu partai dominan, China dapat dikatakan sebagai negara yang tidak menganut sistem demokrasi. Menurut J.J Rousseau yang merupakan seorang filosof dari Perancis, mengatakan bahwa sebuah negara yang demokratis adalah negara yang mengizinkan dan memberi kebebasan pada masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik (Phillip, 2011). Pernyataan dari J.J Rousseau jelas bertolak belakang dengan apa yang dilakukan

oleh pemerintah China dan dengan demikian sangat sulit mengharapkan adanya perubahan sistem sosialis menjadi sistem demokrasi.

Gerakan demokrasi dan tuntutan untuk menghentikan adanya kediktatoran dan totaliter sudah mulai ada sejak kepemimpinan Deng Xiaoping. Pada masa Deng Xiaoping ideology komunisme di China mulai luntur. Pengetahuan tentang komunis sudah hampir hilang didalam pendidikan formal maupun non formal. Selain itu gerakan demokrasi di China juga diimbangi dengan maraknya demonstrasi yang menuntut dihilangkannya kepemimpinan yang totaliter dan adanya korupsi yang terjadi didalam partai komunis. Walaupun tidak menganut sistem demokratis, tetapi di China terdapat sejumlah organisasi non pemerintah atau *NGO* yang mulai menjamur keberadaannya (*Non Govemental Organization Uncivil Society*, 2015).

Kondisi China sebelum adanya *NGO*, Negara tersebut sangatlah tertutup dan bahkan tidak mau menerima ide atau gagasan dari dunia barat maupun internasional. Tidak sedikit pula masyarakat yang mengalami ketimpangan dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka karena pemerintahan yang cenderung tertutup dan otoriter. Sebagai contoh yaitu kota Shenzhen yang merupakan cerminan dari kesuksesan China selama 30 tahun terakhir dalam hal ekonominya. Banyaknya investor dan pekerja yang berdatangan dikota tersebut menjadi kota yang lokasinya berdekatan dengan Hong Kong itu sebagai kota percontohan. Namun meski demikian, kota Shenzhen masih memiliki ketimpangan antara desa dan kota.

Pada masa kepemimpinan Mao Zedong, China dinilai sangat kental akan ideology komunisnya yang melarang adanya gerakan-gerakan demokrasi. Pada saat itu pula tidak ada yang berani untuk menentang kebijakan Mao dan bagi mereka yang menentang kebijakan tersebut akan ditangkap dan dipenjara. Dapat dikatakan bahwa Mao Zedong anti dengan gerakan revolusioner dan tidak terkecuali *NGO* yang tidak

dijijinkan secara resmi oleh pemerintah China pada masa itu. Pemerintah China saat itu melarang adanya gerakan-gerakan perubahan dan demokrasi karena pemerintah takut jika dengan keberadaan NGO akan mengganggu aktivitas keagamaan dan politik di China. Tidak hanya itu, pemerintah pusat khawatir jika kelompok-kelompok demokrasi tersebut nantinya akan membawa ide-ide barat yang jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang ada di China.

Keberadaan *NGO* sudah ada sejak 2,5 dekade yang lalu tetapi mulai berkembang cukup pesat saat era reformasi. Meskipun begitu namun banyak masalah yang harus dihadapi oleh *NGO* untuk mewujudkan kondisi peran aktor sosial yang kondusif. Beberapa masalah yang harus dihadapi diantaranya yaitu kebijakan pemerintah terhadap *NGO*, terbatasnya kapasitas pemerintah dalam mengendalikan permasalahan korupsi yang ada di *NGO*, ketergantungan *NGO* dalam mendapatkan motivasi dari pemerintah dan beberapa kebudayaan politik China yang membuat tidak kondusifnya aktivitas para aktivis (Lu, 2005). Terlebih lagi keberadaan *NGO* maupun kelompok demokrasi lainnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat.

Awalnya keberadaan *NGO* di China dinilai sangat lambat dibandingkan dengan negara lainnya terutama kisaran tahun 1960an dan 1970an yang saat itu terjadi revolusi budaya tetapi keberadaan *NGO* mulai meningkat pesat ketika pasca Perang Dingin tahun 1990. Yang mana tahun tersebut adalah runtuhnya rezim totaliter di Eropa Timur. Pada pasca Perang Dingin, *NGO* di China mulai banyak bermunculan seperti *NGO* yang bergerak dibidang kesehatan, pendidikan, lingkungan bahkan tidak sedikit pula *NGO* di China yang mengatasnamakan gerakan perempuan.

Dengan kemunculan *NGO* yang semakin beragam baik dari karakteristiknya maupun ruang geraknya pemerintah tetap harus membatasi kemunculan *NGO* karena jika terjadi peningkatan yang terus menerus bukan tidak mungkin nantinya

akan mengancam stabilitas sistem politik negara. Bermunculannya *NGO* dinegara yang dinilai tidak demokratis dalam hal ini China justru menjadi menarik untuk dibahas. Dalam skripsi ini penulis akan menjabarkan tentang sebab pertumbuhan *NGO* yang semakin meningkat di China.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu,

Mengapa pertumbuhan organisasi non-pemerintah (*NGO*) di China semakin meningkat pasca perang dingin ?

C. Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan organisasi non pemerintah di China, penulis akan menggunakan teori dan konsep. Sebelum mengetahui teori dan konsep yang digunakan, penulis akan memberikan pengertian tentang teori dan konsep. Teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Secara lebih gampang teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang fenomena yang terjadi (Mas'ood, 1990, p. 185). Konsep adalah salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Konsep dapat diartikan suatu abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau fenomena tertentu (Mas'ood, 1990, p. 95). Yang akan digunakan Konsep *NGO*, *Civil Society*, dan Teori Konstruktivisme. Konsep *NGO*, *Civil Society* dan Teori Konstruktivisme akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep *NGO*

Non Governmental Organization atau *NGO* adalah organisasi non pemerintah yang mendefinisikan sebagai

organisasi yang mengarah pada kepedulian dan kesejahteraan orang-orang yang merasa dirugikan dari adanya perubahan dan pembangunan (Non Governmental Organization). Pendapat lain menyebutkan NGO adalah organisasi legal yang dibentuk oleh secara natural oleh perorangan yang beroperasi secara mandiri dan biasanya istilah NGO digunakan oleh pemerintah untuk mengacu pada mereka yang tidak memiliki status pemerintah. World Bank juga memberikan definisinya terkait NGO. Menurutnya NGO adalah sebuah organisasi yang berkegiatan untuk mengajak mempromosikan kepentingan kaum miskin, menjaga lingkungan, menyediakan pelayanan sosial, dan melakukan pembangunan (Ball & Dunn).

Non Governmental Organization adalah kelompok atau organisasi yang bergerak dalam rangka menyuarakan kepentingan masyarakat terutama pada isu-isu global seperti kemiskinan, lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia. NGO dianggap sebagai sektor ketiga setelah sektor pertama dan kedua negara dan pasar. NGO menawarkan nilai dalam setiap kegiatannya dan menjadi perantara antara negara dan pasar agar dapat menyeimbangkan stabilitasnya. Organisasi non pemerintah muncul ketika terjadi beberapa permasalahan disuatu negara seperti ketimpangan sosial, kemiskinan yang parah, adanya kritik sosial yang mengarah pada pemerintahan, adanya keraguan pada pembangunan, kesadaran baru dari masyarakat akan adanya perubahan dimasa depan.

Non Governmental Organization membutuhkan hubungan yang baik dengan publik agar nantinya dapat mencapai tujuan mereka. Yayasan dan lembaga amal menggunakan cara berhubungan dengan publik yang baik untuk meningkatkan sumber pendanaan mereka dan melakukan *lobby* dengan pemerintah. Organisasi non pemerintah biasanya berupa kepentingan politik karena kemampuan mereka dapat mempengaruhi kebijakan sosial dan politik yang dikeluarkan (p. 4)

Organisasi non pemerintah memang sudah sewajarnya memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Membantu masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial namun tetap tidak merusak tatanan yang sudah ada seperti melakukan perusakan lingkungan. Kegiatan yang *NGO* lakukan adalah semata-mata untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak-pihak tertentu. Dalam aktivitasnya tentu saja setiap *NGO* membutuhkan adanya dukungan baik materi maupun non materi. *NGO* yang beroperasi mendapatkan dukungan materi dari para sukarelawan diberbagai negara yang berbentuk sebuah lembaga ataupun perorangan.

2. *Civil Society*

Civil society dapat diartikan sebagai masyarakat sipil modern yang mampu menjalankan pemerintahan. *Civil society* diartikan pula sebagai gagasan abstrak yang digunakan dalam dinamika sosial yang mana keberadaannya menjadi tolok ukur dari kemajuan dan kemampuan *NGO* disuatu negara. Salah satu peningkatan yang signifikan dari adanya pembangunan di China selama dua dekade terakhir ini adalah munculnya Non Governmental Organization (*NGO*) (YE, 2003). Kemunculan *NGO* di China adalah ide ataupun gagasan oleh individu maupun sekelompok orang yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari adanya pembangunan.

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa dengan kemunculan *NGO* dapat mengubah identitas sebuah negara dalam kasus ini adalah China yang dulunya sangat tertutup dan tidak membuka peluang akan adanya sistem baru menjadi lebih terbuka, menerima keberagaman dan lebih kompetitif dalam sistem politiknya. Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi di China yang terjadi sekita 25 tahun lalu membentuk kesempatan baru bagi partisipasi penduduk China. Masyarakat China mulai mencari cara untuk mengatur kelompok mereka untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan menyampaikan keluh kesahnya serta memiliki

keprihatinan yang nantinya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya perubahan tersebut pemerintah China mengizinkan adanya kemunculan *civil society*.

3. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan suatu pandangan bahwa setiap pengetahuan adalah bentukan atau ide dari diri sendiri. Konstruktivisme disebut juga sebagai landasan berfikir untuk terus menemukan ide-ide baru yang mendorong manusia untuk menjadi lebih aktif. Sedangkan teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menciptakan pengetahuan maupun ide baru yang dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang ada (Teori Pembelajaran Konstruktivisme). Konstruktivisme sendiri berfokus pada ide-ide dan norma, pembangunan struktur, hubungan antara aktor dan struktur. Sejauh mana identitas mempengaruhi perilaku dan tindakan aktor dan sejauh mana norma yang mereka miliki membentuk karakter aktor.

Teori konstruktivisme dianggap sebagai teori alternative dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki asumsi dasar yang berbeda dengan teori arus utama (mainstream theory) seperti Neorealism dan Neoliberalism. Khususnya Neorealism yang berfokus pada aspek material seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi. Sedangkan kaum konstruktivis berpendapat bahwa aspek hubungan internasional yang paling penting adalah dunia sosial (Malik, 2017). Konstruktivism juga dianggap sebagai salah satu pendekatan yang menekankan pada factor ideasional ketimbang material yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku actor hubungan internasional.

Salah satu tokoh dari konstruktivisme adalah Alexander Wendt. Wendt menjelaskan bahwa konstruktivisme didalam hubungan internasional sering kali tindakan sebuah negara didasarkan pada kepentingan, budaya, identitas (Relation.org). Berdasarkan jurnal Finnemore dan Sikkink yang berjudul

International Norm Dynamic and Political Change yang dikutip di *International Relation.org* menyebutkan bahwa konstruktivis mengembangkan norma-norma didalam hubungan internasional dalam keseharian dengan konteks yang lebih khusus seperti pengembangan norma dalam organisasi internasional. Martha Finnemore menambahkan norma-norma masyarakat internasional dapat mempengaruhi identitas dan kepentingan suatu negara. Identitas dan kepentingan suatu negara dapat diartikan sebagai kekuatan internasional yang ditularkan kepada masyarakat maupun organisasi internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Konstruktivisme mendorong masyarakat untuk melahirkan ide-ide, norma, pemikiran baru dan membuka kesempatan adanya perubahan. Konstruktivisme juga mengembangkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ide dan inovasi baru dapat menciptakan sebuah sistem yang dapat mendorong sistem baru seperti pemerintah China yang mulai membuka diri dengan dunia luar. China yang dikenal sebagai Negara komunis yang tertutup dengan ide-ide baru, mulai membuka diri dengan pembaharuan dan modernisasi. Tahun 1978 kepemimpinan Deng Xiaoping, China mereformasi ekonominya dan melahirkan modernisasi yang dikenal dengan 4 modernisasi Deng Xiaoping dibidang bidang ilmu pengetahuan, militer, pertanian dan industri.

Adanya 4 modernisasi tersebut Deng Xiaoping membuat kebijakan pintu terbuka atau *open door policy*. *Open door policy* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah China agar lebih terbuka dengan dunia luar yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di China. Menurut Deng Xiaoping “*Don't care about whether it is a black cat or a white cat; as long as it is able to catch the mouse, it is a good cat*” yang memiliki makna tidak terlalu penting ideologi apa yang dianut oleh suatu Negara yang terpenting adalah bagaimana caranya Negara tersebut menjadi kaya dan baik ekonominya (Kiddle, t.thn.).

Open door policy berdampak sangat baik pada ekonomi masyarakat China. Dalam bidang ekonomi kebijakan pintu terbuka memberikan kesempatan kepada negara lain untuk kegiatan eksport import. Kegiatan eksport import tersebut membawa perekonomian China semakin meningkat bahkan beberapa sumber online dan artikel menyebutkan kenaikan pertumbuhan ekonomi China mencapai 10-12 % pada tahun 1992 (Wei, 1993). Tidak hanya berdampak pada perekonomian Negara tetapi juga pada perekonomian masyarakat China. Diterapkannya kebijakan pintu terbuka di China, pendapatan perkapita masyarakat pun ikut meningkat.

Selain peningkatan ekonomi Negara dan masyarakat, *open door policy* menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk berjejaring dengan dunia luar. Meluasnya jaringan masyarakat China mendorong mereka untuk membentuk sebuah komunitas maupun kelompok yang dapat mengontrol adanya perubahan yang sering disebut dengan *Civil Society*. *Civil Society* yang semakin menyebar, memberikan kesempatan pada terbentuknya organisasi-organisasi baru yang lebih sering disebut dengan organisasi non pemerintah atau NGO. NGO adalah salah satu wujud dari reaksi masyarakat dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat.

Fenomena NGO sudah bukan hal yang baru lagi bagi China. Di era Mao Zedong pemerintah tidak mengizinkan *NGO* untuk beroperasi dinegaranya karena dianggap dapat mengganggu sistem yang sudah berjalan. Selain itu keberadaan *NGO* dapat mengganggu kegiatan keagamaan dan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Namun seiring dengan munculnya modernisasi dan sarat akan tuntutan masyarakat, hingga munculnya para aktivis pemerintah China mengizinkan adanya *NGO* di China. Bahkan pemerintah juga mengizinkan adanya *NGO* asing yang ingin beroperasi di China.

D. Hipotesa

Setelah menulis konsep *NGO*, *Civil Society* dan Teori Konstruktivisme, penulis akan menuliskan hipotesa dari

peningkatan NGO di China. Terdapat hipotesa yang dituliskan :

1. Peningkatan pertumbuhan NGO terjadi karena adanya kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat China.
2. Meningkatnya perekonomian memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berjejaring dengan dunia luar sehingga dapat terbentuklah masyarakat sipil atau *civil society*.

E. Tujuan Penelitian

Dalam proposal ini penulis memiliki ketertarikan terhadap negara China yang menganut sistem komunis secara tidak langsung mampu menerapkan sistem demokrasi. Penerapan sistem demokrasi di China dapat terlihat dari banyaknya NGO yang bermunculan bahkan banyak pula NGO pemerintah asing yang beroperasi di China terutama pasca Perang Dingin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (Hadi, 1997). Sedangkan menurut Prof Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Dapat dituliskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah usaha untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu yang berdasarkan pada fenomena, pandangan-pandangan tertentu atau sumber lainnya. Suatu fenomena maupun pandangan yang berkaitan dengan peningkatan NGO di China pasca Perang Dingin.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian (ibid). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi pustaka berupa data sekunder. Penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel dan media online seperti website resmi maupun berita online. Metode dan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis berkaitan dengan fenomena peningkatan NGO di China.

3. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber dan literature yang sudah tersebar didalam buku, jurnal, artikel, maupun media online yang berkaitan dengan fenomena peningkatan NGO yang terjadi di China pasca Perang Dingin. Data yang diperoleh dapat berupa grafik, table maupun narasi yang akan diterapkan sesuai dengan teori dan konsep yang sudah dituliskan.

4. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan penulis merupakan metode deduktif. Penulisan skripsi ini dimulai dengan penjelasan secara umum yang kemudian dijelaskan secara khusus. Dalam penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu menuliskan fenomena kemunculan NGO di China yang dilanjutkan dengan fenomena peningkatan NGO pasca Perang Dingin di China.

G. Batasan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan menuliskan peningkatan NGO di China dengan batasan waktu pasca perang dingin hingga masa pemerintahan Jiang Zemin pada tahun 2003.

H. Sistematika penulisan

Dalam skripsi ini penulis akan menuliskan sistematika penulisan yang terdiri dari :

Bab I

Dalam bab ini penulis menuliskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berfikir, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II

Dalam bab ini penulis menuliskan tentang fenomena kemunculan NGO di China yang terdiri dari sejarah NGO di China, macam-macam NGO dan hambatan yang dihadapi NGO di China.

Bab III

Dalam bab ini penulis menuliskan faktor peningkatan NGO di China dengan menggunakan teori dan konsep yang sudah dituliskan yang terdiri dari China dan globalisasi, pertumbuhan ekonomi China dan kemudahan berjejaring masyarakat China.

Bab IV

Dalam bab ini penulis menuliskan peran NGO di China yang terdiri dari Implementer Role, Catalyst Role, dan Partnership Role.

Bab V

Dalam bab ini adalah penutup dan kesimpulan dari setiap bab secara keseluruhan.